

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat telah berdiri selama dua abad lamanya setelah adanya perpecahan Kerajaan Mataram Islam hingga saat ini. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini dipimpin oleh Keluarga yang berwangsa Hamengku Buwono, yang pemimpinnya bergelar sebagai *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Ngalaga Abdurrahaman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng kaping ...* (diisi untuk keberapa) *ing Ngayogyakarta*, atau lebih sederhana dikenal sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono.

Dengan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, maka segala sistem tata kelola pemerintah dan kepemimpinan wilayah yang ada menjadi tanggung jawab yang tak terpisahkan oleh Wangsa Hamengku Buwono. Oleh karena itu peran sultan sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus pemimpin adat dan agama memiliki kiprah yang mendalam bagi pengikut Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Maklumat Sri Sultan Hamengku Buwono IX bersama Sri Paduka Pakualam VIII pada 5 September 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Kesultanan Ngayogyakarta menjadi daerah yang istimewa yang bergabung dengan Republik Indonesia dengan status Daerah Istimewa yang bersifat kerajaan untuk menjalankan pemerintahan daerahnya. Sejak saat itulah Kasultanan Ngayogyakarta menjadi bagian Pemerintah Daerah Istimewa Ngayogyakarta dibawah Pemerintah Pusat Indonesia.

Kearifan “*Nagari Ngayogyakarta*” yang sudah berdiri beberapa abad tersebut sehingga tidak dapat dihilangkan begitu saja, oleh karenanya atas kebijaksanaan Pemerintah Indonesia dan perjuangan segenap lapisan dari Kesultanan Yogyakarta pada saat itu menyatakan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat kerajaan akan tetap dipimpin oleh seorang sultan, dan seorang sultan tetaplah menjadi sultan tanpa memutuskan garis adat yang telah berlangsung di tengah berdirinya negara republik di negeri ini. Setelahnya, keistimewaan yang ada sebagai Sultan Hamengku Buwono yang menjadi pemimpin daerah Yogyakarta pada era Kemerdekaan dan era Orde baru yang diemban oleh *swargi dalem*¹ Sultan Hamengku Buwono IX kemudian diteruskan oleh putra dalem beliau yang bernama Herjuno Darypto yang dewasa dianugerahi sebagai *Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH)* Mangkubumi yang kemudian diangkat sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Berbekal amanah Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang menyatakan bahwa, seorang pemimpin siapa pun dan dimana pun tempatnya, adalah orang pilihan di antara warganya. Ia bak utusan Allah, perpanjangan peran Allah di dunia ini (*kalifatullah*). Sebagai wakil tuhan, tentu orientasinya menyejahterakan rakyat, menjaga umat dan mewujudkan amar makruf nahi mungkar. Ia mengajak melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (Tri Agung Kristanto: 2012). Sehingga seorang sultan yang kemudian menjadi seorang pemimpin di DIY ini

¹ *Swargi dalem* (bahasa jawa): Gelar Almarhum bagi Sultan dan Sunan

dituntut untuk memahami falsafah Jawa sebagai pemimpin juga. Falsafah ini mengandung trilogi (*senopati ing ngalaga, ngabdurrahman sayidin panatagama* dan *kalifatullah*²) dan falsafah Jawa lainnya dikembangkan oleh seorang sultan sendiri untuk mengayomi masyarakat di negeri ini (Adji 2012). Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X yang didasari atas hal tersebut akan menjadi sebuah kepemimpinan yang relevan sesuai dengan sistem pemerintahan yang berlangsung di Indonesia. Kepemimpinan beliau ditengah negeri dan tuntutan demokrasi yang ada tidak menjadikan seorang sultan sebagai pemimpin yang pudar oleh zaman. Keistimewaan ini muncul di tengah demokrasi yang dihadirkan secara sadar.

Kepemimpinan yang istimewa itu hadir dan terwujud di tengah Indonesia merupakan sebuah refleksi dari pantulan nilai keistimewaan yang luar biasa dari demokrasi yang ada. Refleksi dari keistimewaan kepemimpinan ini berdiri menjadi paduan keragaman budaya pemerintahan yang harmoni merujuk pada nilai perjuangan di Republik Indonesia dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian ketika negeri ini telah sepakat mengadopsi nilai-nilai demokrasi yang ada sebagai penerus kepemimpinan politik dan pemerintahan yang ada bagi setiap pemerintah daerah di Indonesia, namun tidak serta merta melenyapkan salah satu proses pengangkatan pemimpin istimewa yang telah menjadi bagian sejarah dalam rupa Daerah Istimewaan Yogyakarta. Sehingga dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

² Gelar Sultan Hamengku Buwono yang artinya; Panglima dalam medan Perang, Pemimpin dan pemuka agama, serta pemimpin manusia

Kelahiran Undang Undang Keistimewaan DIY tidak semata mata menjadi hal yang mulus bagi masa depan Sultan Hamengku Buwono X dan DIY. Perancangan Keistimewaan DIY, menjadi konflik perdebatan yang panjang antara Pemerintah Republik Indonesia yang kala itu pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dengan segenap lapisan yang ada pada Yogyakarta. Ambiguitas pernyataan dari SBY pada saat itu yang menyatakan “Bahwa Tidak mungkin ada sistem monarki yang bertabrakan baik dengan konstitusi maupun nilai demokrasi” (Newsdetik 2010) membawa pergeseran diskusi keistimewaan tersebut bergeser pada ranah permasalahan pribadi antara Sultan Hamengku Buwono X dan SBY sendiri. Menurut pernyataan SBY pada saat itu menginginkan bahwa konsensus keistimewaan DIY tidak hanya berfokus pada permasalahan pengangkatan wangsa Hamengku Buwono – Paku Alam sebagai pemimpin daerah saja, akan tetapi sebuah konsensus yang merupakan *breakdown* dari Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B Ayat (1) dan (2), yang kurang lebihnya bahwa NKRI menghormati adanya pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan status istimewa yang kemudian diatur dengan undang-undang, NKRI juga menghormati segenap hukum adat dan hak hak tradisionalnya yang telah berlaku dalam pemerintah daerah tersebut selama masih relevan dalam kehidupan masyarakat NKRI.

Lebih dalam kemudian, Undang-Undang Keistimewaan menyatakan bahwa status Kasultanan Ngayogyakarta yang bersifat kerajaan bergabung dengan NKRI dengan status yang istimewa dan penghormatan dalam beberapa urusan yang dijabarkan dalam urusan pengangkatan kepala daerah, kelembagaan, pertanahan,

tataruang, dan kebudayaan. Selain itu menjadi sebuah bentuk penghormatan terhadap kiprah *swargi dalem* Hamengku Buwono IX banyak membawa suatu adaptasi yang besar menuju prosesi transformasi DIY yang lebih modern, *swargi dalem* Hamengku Buwono IX banyak membantu NKRI sebagai negara yang baru merdeka. Penulis teringat dengan cerita sejarah yang berkembang, pada masa awal kemerdekaan *swargi dalem* Hamengku Buwono IX melanggar paugeran adat dengan menggunakan “*udik kraton*”³ yang semestinya untuk menggaji abdi dalem kraton, akan tetapi untuk membantu keuangan dan kas NKRI yang masih kosong untuk mendanai Republik Indonesia yang masih berdiri. Ini adalah bukti besar kelayakan bahwa pada saat kepemiminan *swargi dalem* Hamengku Buwono IX, sehingga Daerah Istimewa Yogyakarta memang layak menyandang status istimewa bukan karena sebuah histori sebagai kerajaan mardikan, akan tetapi suatu keluhuran dari sultan dan gubernur yang telah memimpin sebelumnya.

Pada 2020 memasuki sewindu lamanya Undang Undang tersebut tetap kukuh dan dipertahankan yang harus menjadi dasar keberlangsungan dan berkelanjutan Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin daerah yang mampu berkiprah untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakatnya tanpa terkecuali. Sewindu momentum keistimewaan tersebut terdapat banyak hal yang menjadi hasil karya dan jerih payah pemikiran dan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X untuk mendorong segenap OPD membangun semangat optimisme keistimewaan

³ Udik Kraton (Bahasa Jawa): merupakan harta (keuangan) sebagai gaji abdi dalem

DIY. Dalam menjaga keistimewaan Sultan Hamengku Buwono X membawa harmonisasi budaya pemerintahan dari rumah tangga Kraton Yogyakarta menuju Komplek Kepatihan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Akan tetapi, fakta empiris yang terjadi pada Daerah Istimewa Yogyakarta pasca 2012 hingga momentum sewindu keistimewaan DIY menunjukkan keberlangsungan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X tidak serta merta menjadikan pemimpin yang mampu berjalan sesuai kehendak kepemimpinan yang dahulu dan nilai nilai *paugeran*⁴ kasultanan. Salah satu hal yang mampu menjadi suatu tanda kelemahan kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X adalah terjadinya momentum *Dhawuh Raja*⁵ dan *Sabdatama*⁶ pada 2015 yang secara politis dinyatakan dalam penelitian Bayu Dardias Kurniadi (2016) bahwa, Sultan Hamengku Buwono X menggiring kekuatan politik “langit” untuk mengubah gelar dan menyiapkan GKR Mangkubumi sebagai penerus Kesultanan Ngayogyakarta yang selanjutnya, kemudian keputusan tersebut membawa konflik internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, antara Sultan dengan para *Rayi Dalem*⁷ *Swargi Dalem* Hamengku Buwono IX yang berkepanjangan hingga momentum sewindu keistimewaan DIY. Kelemahan Sultan menandakan adanya suatu kelemahan yang signifikan yang tidak terjadi pada *Swargi Dalem* Hamengku Buwono IX.

⁴ *Paugeran* (Bahasa Jawa): Aturan Adat yang bersifat yuridis berlaku pada ranah Kasultanan

⁵ *Dhawuh Raja*: Perintah Raja secara resmi menuju pada titah yang harus dilaksanakan

⁶ *Sabdatama*: Perintah Raja dalam suatu konsesus tertentu untuk memberikan pernyataan

⁷ *Rayi Dalem*: Sebutan bagi saudara Sultan yang lebih muda dan menyandang gelar Pangeran Dalem

Gejolak konflik internal yang didasari atas keputusan Sultan yang dianggap lemah dan gegabah juga berdampak sangat besar bagi lapisan Masyarakat DIY dan Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta meski tidak berdampak secara material. Menurut Bayu Dardias Kurniadi yang penulis lansir dari laman Tirto.id, menyatakan keputusan Sultan merupakan keputusan pribadi yang menimbulkan konflik jauh yang lebih besar bagi keturunannya sendiri dan penerusnya serta dianggap sebagai sebagai sebuah *pelanggaran*⁸ atau hegemoni. Besar tanggungjawab yang harus ditanggung oleh Sultan Hamengku Buwono X untuk memperbaiki keadaan sehingga kembali kepada kearifan kesitimewaan DIY yang harus menjadi kiprahnya.

Sultan Hamengku Buwono X mewarisi nilai-nilai ayahandanya sebagai penerus pemimpin DIY, akan tetapi juga dalam kepemimpinannya melahirkan konflik – konflik baru yang dalam masa sewindu belum ditemukan penyelesaiannya secara baik dan akan menimbulkan kegaduhan yang jauh lebih besar di masa yang akan datang. Atas dasar tersebut terdapat sebuah ketertarikan masalah yang terjadi pada Daerah Istimewa dan Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin DIY. Segudang kiprah dan segudang konflik yang terjadi dalam momentum Sewindu Keistimewaan DIY kemudian menjadi dasar yang mewarnai dalam penelitian ini.

Sehingga dari latar belakang yang ada dapat kembangkan sebuah penelitian terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan konflik Provinsi Daerah Istimewa

⁸ *Pelanggaran* (Bahasa Jawa): keutuhan sepanjang hayat

Yogyakarta yang merupakan cerminan Sultan Hamengku Buwono X dalam memimpin daerahnya. Terlebih lagi dengan dukungan nilai perjuangan masyarakat, ayahanda, dan histori yang telah terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi nilai yang lebih bagi seorang Sultan Hamengku Buwono X dalam memangku jabatan Gubernur Yogyakarta. Dengan demikian judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “*Kiprah Sultan Hamengku Buwono X Dalam Refleksi Sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan dan dijabarkan oleh penulis maka dalam penelitian Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam Refleksi Sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana kiprah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai seorang pemimpin dalam refleksi sewindu Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian kepemimpinan pemerintahan di Pemerintah Daerah Yogyakarta karena satu satunya pemerintah daerah yang dipimpin dengan aturan perundang undangan Republik Indonesia yang berdampingan dengan *Paugeran* Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Hal tersebut diakui sebagai aset pemerintah secara yudiris oleh Republik Indonesia. Terlebih lagi penulisan ini didesikasikan untuk meneliti peran Sultan Hamengku

Buwono X dalam memimpin Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan refleksi dari amanah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, penulisan penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut;

1. Penulis ingin mengetahui, mengulas, dan menganalisis kiprah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap pelaksanaan refleksi Sewindu Keistimewaan DIY dalam prespektif teori transformasional.
2. Penelitian lebih dalam mengenai beberapa konflik yang terjadi dalam kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemimpin daerah yang istimewa selama sewindu lamanya keistimewaan DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan membawa manfaat sebagai berikut;

- 1. Manfaat Teoritis**
 - a. Penulis berharap penelitian ini menjadi informasi yang baru dan unik dalam perkembangan keilmuan bidang politik dan pemerintahan, terlebih lagi menjadi pembelajaran bagi bidang kepemimpinan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - b. Penulis berharap penelitian ini menjadi sumber manfaat bagi generasi pemimpin yang akan datang di masa depan sebagai sarana pembelajaran dan pembukaan wawasan baru dalam bidang

kepemimpinan pemerintahan, terlebih lagi pemimpin yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Republik Indonesia.

- c. Penulis juga berharap, penelitian ini mampu menjadi referensi pembelajaran tentang permasalahan kepemimpinan yang bersifat istimewa di Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumber kebermanfaatan untuk pembaca atau peneliti lain tentang Kiprah Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan dalam penyelesaian konflik dalam kepemimpinannya.
- b. Sebagai salah satu sumber acuan dalam pelaksanaan praktik kepemimpinan pemerintahan di Republik Indonesia, terlebih lagi dalam pembelajaran terhadap nilai kepemimpinan dengan falsafah dan khazanah budaya juga nilai sejarah panjang Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Wangsa Hamengku Buwono.

1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti mencari berbagai sumber sumber penelitian terdahulu sebagai acuan dalam melakukan penelitian kiprah Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Akan tetapi, penelitian atau studi juga literatur yang meneliti tentang Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur belum banyak dilakukan oleh akademisi. Melalui pencarian secara daring, salah satu penelitian tentang kepimipinan Sultan

Hamengku Buwono X pernah dilakukan secara kualitatif oleh Sofie Dwi Rifayani Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP pada tahun 2013 dengan judul Implikasi Kedudukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Demokratisasi Dan Efektivitas Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi pembahasan masih bersifat skala yang belum luas.

Sofie Dwi Rifayani (2013) meneliti kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dengan memahami nilai nilai demokrasi yang terjadi didunia. Sofie Dwi Rifayani membenturkan sistem monarki (kerajaan) dengan nilai demokrasi yang terjadi di Republik Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan tanpa adanya pembanding dan dasar hukum baru yang menjadi landasan Sultan Hamengku Buwono X diangkat secara konstitusi istimewa sebagai Gubernur DIY, yaitu Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibandingkan penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan acuan undang undang keistimewaan DIY sehingga ketika nantinya penelitian ini dilaksanakan tidak menyimpang dengan teori dan landasan aturan yang ada. Terlebih lagi penelitian ini merujuk pada kiprah seorang Sultan Hamengku Buwono X sebagai Sultan Yogyakarta juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus memimpin mengikuti perkembangan jaman sesuai dengan teori yang melandasi yaitu kepemimpinan transformasional.

1.6 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka beberapa studi dan kajian teori dijabarkan oleh penulis dalam matriks teori untuk meneliti Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam refleksi Kesitimewaan DIY yang disajikan sebagai berikut;

Tabel 1.1 Matriks Tinjauan Pustaka Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam Refleksi Keistimewaan DIY

Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam Refleksi Sewindu Kesitimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta			
No	Teori	Definisi	Indikator Teori
1	Kepemimpinan Karismatik	Karisma adalah kata Yunani yang berarti "karunia yang diilhami secara ilahi," seperti kemampuan untuk melakukan mukjizat atau memprediksi peristiwa di masa depan. Weber (1947) menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan suatu bentuk pengaruh yang tidak didasarkan pada tradisi atau otoritas formal melainkan pada persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkahi dengan kualitas luar biasa.	<ul style="list-style-type: none"> (1) mengartikulasikan visi yang menarik, (2) menggunakan bentuk komunikasi yang kuat dan ekspresif ketika mengartikulasikan visi, (3) mengambil risiko pribadi dan membuat pengorbanan diri untuk mencapai visi, (4) mengkomunikasikan harapan yang tinggi, (5) mengekspresikan optimisme dan kepercayaan pada pengikut, (6) perilaku pemodelan yang konsisten dengan visi, (7) mengelola kesan pengikut tentang pemimpin, (8) membangun identifikasi dengan kelompok atau organisasi, dan memberdayakan pengikut.
2	Kepemimpinan Demokratis	Kepemimpinan demokratis berhubungan dengan	<ul style="list-style-type: none"> (1) Pengambilan keputusan (2) Keterlibatan bawahan (3) Ide dan masukan

		<p>peningkatan produktivitas pengikut, kepuasan, keterlibatan, dan komitmen (Hackman & Johnson, 1996). Mereka mendelegasikan wewenang kepada pengikut dan juga memberikan dukungan dan fokus berkelanjutan untuk pekerjaan yang menantang. Seringkali gaya pemimpin ini memiliki visi untuk mewujudkan apa yang dibutuhkan orang dan memastikan bahwa mereka mendapatkannya.</p> <p>Dalam prosesnya mereka menghasilkan organisasi yang sukses dan berkelanjutan. Kepuasan anggota lebih besar di bawah kepemimpinan demokratis (Bass, 1990; Stogdill, 1974)</p>	<p>(4) Partisipasi karyawan (5) Faktor motivasi (6) Partisipasi dan berbagi keterampilan (7) Bekerja dengan karyawan (8) Mediasi</p>
3	Kepemimpinan Transformasional	<p>Bass dan Riggio (2006) menyatakan pemimpin transformasional, pada sisi lain mereka (pemimpin) yang merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa dan, dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri. Pemimpin transformasional membantu pengikut tumbuh dan</p>	<p>a) Idealized Influence (Karisma atau Pengaruh Ideal) b) Inspirational Motivation (Inspirasi atau Motivasi Inspirasional) c) Intellectual Stimulation (Stimulasi Intelektual) d) Individualized Consideration (Pertimbangan yang bersifat Individual)</p>

		berkembang menjadi pemimpin dengan menanggapi kebutuhan pengikut individu dengan memberdayakan mereka dan dengan menyelaraskan tujuan dan sasaran pengikut individu, pemimpin, kelompok, dan organisasi yang lebih besar.	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Matriks tinjauan pustaka yang dijabarkan pada tabel 1.1 menjelaskan beberapa teori yang dinyatakan cocok untuk meneliti Kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam refleksi Sewindu Keistimewaan DIY diantaranya Kepemimpinan Karismatik, Demokratis, dan Transformasional. Selanjutnya, dari matriks yang telah dijabarkan Penulis memfokuskan penelitian kedalam teori transformasional sebagai landasan melaksanakan penulisan. Kepemimpinan Transformasional kemudian secara rinci akan dibahas pada sub-bab dan sub sub-bab yang selanjutnya.

1.6.1 Kepemimpinan Transformasional

Sejak awal 1980-an, salah satu metode kepemimpinan saat ini dan yang paling populer adalah metode transformasional, yang telah menjadi fokus banyak penelitian. Kepemimpinan transformasional merupakan bagian dari paradigma “kepemimpinan baru” (Bryman, 1992), yang lebih memperhatikan karisma dan unsur emosional kepemimpinan. Dalam kutipan Peter G. Northouse ketika menganalisis isi artikel yang diterbitkan dalam *Leadership Quarterly*, Lowe dan Gardner (2001) menemukan bahwa sepertiga dari penelitian tersebut adalah tentang

kepemimpinan transformasional atau karismatik. Demikian pula, Antonakis (2012) menemukan bahwa jumlah makalah dan kutipan di bidang ini telah meningkat pada tingkat yang lebih cepat, tidak hanya di bidang tradisional seperti manajemen dan psikologi sosial, tetapi juga dalam disiplin lain seperti keperawatan, pendidikan, dan teknik Industri.

Bass dan Riggio (2006) percaya bahwa keberadaan kepemimpinan transformasional mungkin karena penekanannya pada motivasi internal dan kemajuan pengikut, yang sejalan dengan kebutuhan organisasi kerja saat ini, yang ingin terinspirasi dan diberdayakan untuk berhasil dalam waktu yang tidak pasti. Jelas, banyak akademisi mempelajari keberlangsungan kepemimpinan transformasional, yang menempati posisi sentral dalam penelitian kepemimpinan. Sesuai dengan namanya, kepemimpinan transformasional adalah proses mengubah dan mentransformasikan orang. Proses ini melibatkan emosi, nilai, etika, standar dan tujuan jangka panjang. Ini termasuk mengevaluasi motivasi pengikut, memenuhi kebutuhan mereka, dan memperlakukan mereka sebagai orang yang utuh.

Kepemimpinan transformasional memerlukan tingkat pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dapat menginspirasi orang untuk melampaui harapan mereka yang biasa. Ini adalah proses di mana kepemimpinan karismatik dikombinasikan dengan visi. Kepemimpinan transformasional, sebagai strategi yang mencakup semua, dapat digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kepemimpinan, dari upaya yang sangat tepat untuk memengaruhi pengikut satu lawan satu hingga upaya yang sangat besar untuk memengaruhi seluruh perusahaan

dan bahkan seluruh budaya. Meskipun pemimpin transformasional membantu mempercepat perubahan, pengikut dan pemimpin saling terkait erat dalam proses transformasi.

1.6.1.1 Definisi Kepemimpinan Transformasional

“... Its emergence as an important approach to leadership began with a classic work by political sociologist James MacGregor Burns titled Leadership (1978). In his work, Burns attempted to link the roles of leadership and followership. He wrote of leaders as people who tap the motives of followers in order to better reach the goals of leaders and followers (p. 18). For Burns, leadership is quite different from power because it is inseparable from followers’ needs.” (Northouse 2016)

Penulis mengutip dan mengkaji definisi dari kepemimpinan transformasional dari karya James MacGregor Burns yang dikutip oleh Peter G. Northouse (2016) dengan judul *“Leadership Theory and Practice, Seventh Edition”*. Dijelaskan bahwa pertama kali kepemimpinan transformational dilahirkan oleh karya Downton, kemudian kemunculan dari berbagai pendekatan kepemimpinan transformasional banyak diulas dan dikembangkan pada karya James MacGregor Burns yang berjudul *“Leadership”* (1978). Dalam hasil karyanya Burns berusaha menggabungkan antara role model seorang pemimpin dengan pengikutnya. Burns menulis bagaimana seseorang menjadi pemimpin memanfaatkan motif dari pengikutnya untuk mencapai tujuan pemimpin dan pengikutnya dengan lebih baik. Kata Burns, kepemimpinan adalah hal yang sangat

berbeda dengan kekuasaan, karena seni dalam kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pengikut.

Burns dalam Peter G. Northouse (2016) menyatakan perbedaan dari dua jenis kepemimpinan; Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional. Kepemimpinan transaksional mengacu pada sebagian besar model kepemimpinan, yang berfokus pada pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan pengikut mereka. Seperti halnya yang terjadi pada manajer di sebuah perusahaan. Manajer menawarkan promosi kepada karyawan yang melampaui tujuan mereka menunjukkan adanya praktik kepemimpinan transaksional. Sama halnya juga yang terjadi pada jenjang pendidikan, seorang dosen akan bertindak sebagai individu pemimpin yang transaksional ketika memberi nilai pada mahasiswanya atas tugas yang telah diselesaikan. Dimensi pertukaran kepemimpinan transaksional sangat umum dan dapat diamati pada banyak tingkatan di semua jenis organisasi.

Berbeda dengan halnya kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional adalah proses dimana seseorang terlibat dengan orang lain dan menciptakan hubungan yang meningkatkan tingkat motivasi dan moral baik dalam pemimpin dan pengikut. Tipe pemimpin ini memperhatikan kebutuhan dan motif pengikut dan mencoba membantu pengikut mencapai potensi penuh mereka. Penulis menulis kembali yang apa yang ditulis oleh Burns, Burns memberikan gambaran contoh dari Mahatma Gandhi sebagai pedoman klasik keberhasilan gaya kepemimpinan transformasional. Bagi Burns, sosok Gandhi mengangkat harapan dan tuntutan jutaan rakyatnya, dan, dalam prosesnya, dirinya sendiri berubah.

Dunia organisasi pemerintahan, adanya seorang pemimpin negara atau daerah yang mampu mengubah tatanan dan budaya birokrasi dalam pemerintah untuk mendengar apa yang menjadi motif pengikutnya untuk menciptakan skema bagaimana melayani masyarakat yang mencerminkan sikap yang adil juga manusiawi terlebih guna mensejahterakan kepentingan publik. Prosesi dalam organisasi pemerintahan tersebut dapat dikategorikan dalam nilai kepemimpinan transformasional,

Pernyataan Burns kemudian dikembangkan oleh Bernard M. Bass dan Ronald E. Riggio dalam buku *Transformational Leadership Second Edition* (2006), yang menyatakan;

“...Transformational leaders, on the other hand, are those who stimulate and inspire followers to both achieve extraordinary outcomes and, in the process, develop their own leadership capacity. Transformational leaders help followers grow and develop into leaders by responding to individual followers’ needs by empowering them and by aligning the objectives and goals of the individual followers, the leader, the group, and the larger organization...”

Bass dan Riggio (2006) menyatakan pemimpin transformasional, pada sisi lain mereka (pemimpin) yang merangsang dan menginspirasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa dan, dalam prosesnya mengembangkan kapasitas kepemimpinan mereka sendiri. Pemimpin transformasional membantu pengikut tumbuh dan berkembang menjadi pemimpin dengan menanggapi kebutuhan pengikut individu dengan memberdayakan mereka dan dengan menyelaraskan

tujuan dan sasaran pengikut individu, pemimpin, kelompok, dan organisasi yang lebih besar.

Penulis dapat memahami sebuah konsepsi tentang nilai kepemimpinan transformasional yang dikemukakan Bass dan Riggio (2006). Konsepsi kepemimpinan hadir mendorong pemimpin memberikan suatu gagasan yang besar yang dimiliki oleh diri yang didukung oleh kemampuan intelektual untuk mendorong sebuah tekad besar bagi pengikut untuk mencapai tujuan pemimpin. Sehingga dalam penelitian ini, penulis membahaskan kiprah kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perspektif nilai nilai dan tujuan dari Keistimewaan DIY yang kemudian diakomodasikan ke dalam teori Kepemimpinan Transformasional yang banyak dikembangkan oleh Burns dan dikembangkan oleh Bass dan Riggio (2006).

1.6.1.2 Faktor Kepemimpinan Transformasional

Faktor atau nilai atau indikator dari Kepemimpinan Transformasional yang dikemukakan oleh Burns dan dikembangkan oleh Bass dan Riggio (2006) dijabarkan kedalam empat (4) pengaruh besar. Berikut adalah faktor atau nilai atau indikator yang ada dalam Kepemimpinan Transformasional;

a. *Idealized Influence* (Pengaruh Ideal atau Karisma Diri)

“... The leaders are admired, respected, and trusted. Followers identify with the leaders and want to emulate them; leaders are endowed by their followers as having extraordinary capabilities, persistence, and determination...” (Riggio 2006)

Faktor pertama yang dikemukakan dalam kepemimpinan transformasional adalah pengaruh ideal atau karisma diri. Penulis memahami sebuah pengaruh ideal seperti yang dikemukakan oleh Bass dan Riggio (2006) bahwa sejatinya para pemimpin dikagumi, dihormati, dan dipercaya. Pengikut mengidentifikasi dengan para pemimpin dan meniru (serta melaksanakan) mereka (pemimpin); pemimpin dianugerahi oleh pengikut mereka sebagai orang dengan kemampuan, ketekunan, dan tekad yang luar biasa. Bass dan Riggio (2006) dalam buku "*Transformational Leadership, Second edition*" bahwa dalam pengaruh ideal, pemimpin juga memiliki sebuah komitmen rasa yang tinggi akan misi kolektif pengikutnya untuk mencapai sebuah gagasan serta tujuan (visi) yang besar.

Pengaruh yang diidealkan dijelaskan apabila pemimpin banyak memberikan panutan yang kuat bagi pengikut; pengikut akan mengidentifikasi sesuai dengan direksi pemimpin ini dan ingin meniru mereka. Para pemimpin ini biasanya memiliki standar perilaku moral dan etika yang sangat tinggi dan dapat diandalkan untuk melakukan hal yang benar. Mereka sangat dihormati oleh pengikut mereka dan mereka biasanya memiliki kepercayaan pada mereka. Mereka menyediakan pengikut mereka dengan rasa visi dan misi. Faktor-faktor yang mempengaruhi ideal diukur dengan dua bagian: bagian atribusi mengacu pada atribusi yang dibuat oleh pemimpin berdasarkan pandangan mereka tentang pemimpin; bagian perilaku mengacu pada pengamatan perilaku pemimpin oleh para pengikut. Pada sebuah intinya, faktor karisma atau pengaruh ideal menggambarkan orang-orang yang istimewa dan yang membuat orang lain mau mengikuti visi yang mereka kemukakan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator pengaruh ideal yang dikembangkan dalam prespektif kepemimpinan daerah yang bersifat istimewa.

b. *Inspirational Motivation (Inspirasi atau Motivasi Inspirasional)*

“Transformational leaders behave in ways that motivate and inspire those around them by providing meaning and challenge to their followers’ work. Team spirit is aroused. Enthusiasm and optimism are displayed. Leaders get followers involved in envisioning attractive future states; they create clearly communicated expectations that followers want to meet and also demonstrate commitment to goals and the shared vision ...” (Riggio 2006)

Faktor kedua dalam teori transformasional adalah sebuah motivasi inspirasional atau inspirasi. Faktor ini dijelaskan oleh Bass dan Riggio (2006) bahwa, pemimpin memiliki sebuah pengaruh motivasi dan inspirasi yang besar kepada pengikut. Motivasi dapat dilakukan oleh pemimpin dengan memberikan sebuah makna atau tantangan terhadap pelaksanaan pekerjaan/gagasan. Dalam kepemimpinan transformasional yang terjadi pada lingkup pemerintahan, maka pemimpin dapat menciptakan sebuah sikap yang antusias dan optimis dari pengikut. Sehingga faktor motivasi inspirasional yang diciptakan juga melahirkan sebuah sinergi besar antara pemimpin dengan pengikut dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.

Lebih dalam, peneliti menggunakan indikator motivasi inspirasional yang dikorelasikan dengan kiprah Sultan Hamengku Buwono X yang tertuang dalam pembangunan daerah mewujudkan refleksi sewindu keistimewaan DIY yang salah satu tujuannya “menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat”.

Dengan demikian pembahasan indikator motivasi inspirasional akan mengulik dorongan besar yang dibulatkan dalam komitmen Sultan Hamengku Buwono X dan OPD DIY untuk mewujudkan gagasan besar DIY tetap istimewa.

c. *Intellectual Stimulation* (Stimulasi Intelektual)

“Transformational leaders stimulate their followers’ efforts to be innovative and creative by questioning assumptions, reframing problems, and approaching old situations in new ways. Creativity is encouraged. There is no public criticism of individual members’ mistakes. New ideas and creative problem solutions are solicited from followers, who are included in the process of addressing problems and finding solutions...” (Riggio 2006)

Faktor yang selanjutnya adalah stimulasi intelektual. Bass dan Riggio (2006) memberikan dorongan bahwa seorang pemimpin memberikan sebuah stimulasi intelektual kepada pengikutnya sehingga pengikut mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam lingkup organisasi dengan segala cara yang solutif. Stimulasi intelektual yang diberikan oleh pemimpin diwujudkan dalam bentuk dorongan atau sebuah pemikiran yang inovatif dan kreatif, dalam hal ini pemimpin memberikan sebuah direksi yang menggabungkan antara pemahaman intelektual masa lampau dengan pemahaman intelektual yang aktual, sehingga relevansinya seorang pemimpin dan pengikut mampu menjadi orang yang adaptif menghadapi permasalahan dalam organisasi.

Penulis menggunakan indikator stimulasi intelektual yang telah dijelaskan terhadap relevansi kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X yang membawa suatu paham tradisi dari budaya kepemimpinan milik leluhur di Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam tatanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjutnya kupasan dari awal pemahaman pengetahuan lampau yang dibawa oleh Sultan Hamengku Buwono X dapat menjadi sebuah stimulasi intelektual oleh pengikutnya untuk menciptakan kreatifitas dan inovasi menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam sendi keistimewaan DIY.

d. Individualized Consideration (Pertimbangan yang bersifat Individual)

“Transformational leaders pay special attention to each individual follower’s needs for achievement and growth by acting as a coach or mentor. Followers and colleagues are developed to successively higher levels of potential. Individualized consideration is practiced when new learning opportunities are created along with a supportive climate. Individual differences in terms of needs and desires are recognized. The leader’s behavior demonstrates acceptance of individual differences (e.g., some employees receive more encouragement, some more autonomy, others firmer standards, and still others more task structure). ...”

(Riggio 2006)

Faktor keempat dari kepemimpinan transformasional disebut pertimbangan yang bersifat individual. Faktor ini mendorong seorang pemimpin untuk bertindak menjadi seorang mentor bagi pengikut. Pengikut dapat mengembangkan sebuah keputusan pribadi dari pemimpin ke tingkat yang lebih jauh. Pertimbangan yang bersifat individu dilakukan pemimpin untuk menghadapi dua situasi permasalahan yang bertolak belakang. Sehingga pertimbangan yang bersifat individu dari pemimpin meski tidak akan memuaskan berbagai pihak tetapi dapat menyelesaikan masalah dengan sedikit resiko. Lebih dalam lagi, keputusan yang

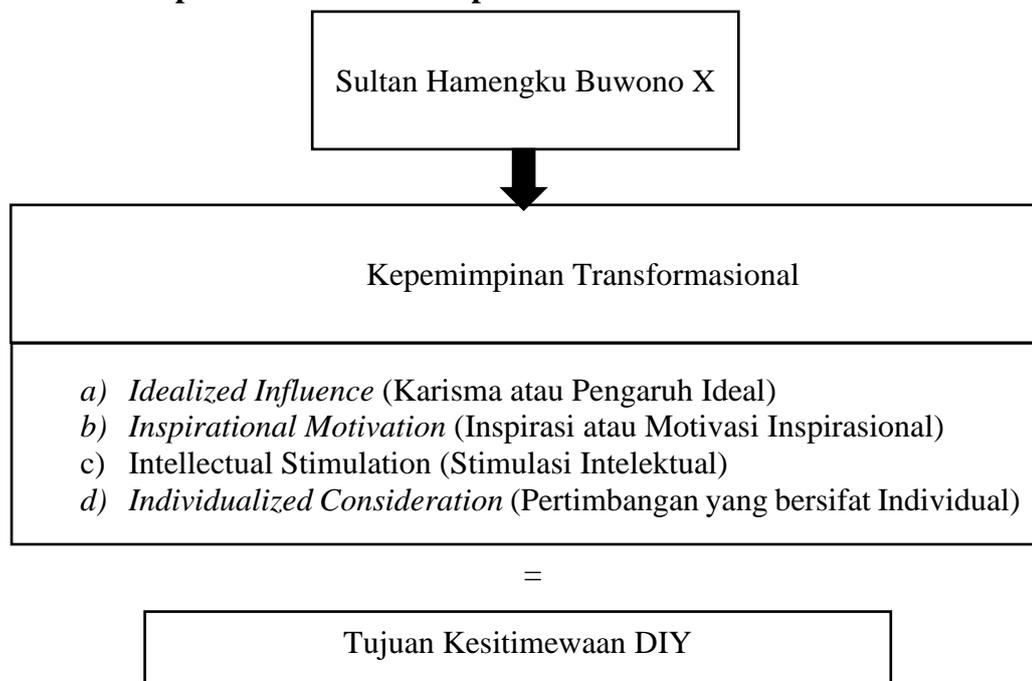
bersifat individu dapat dijabarkan secara sederhana dari kebijaksanaan seorang pemimpin dalam menghadapi perbedaan pendapat, ketika pemimpin dapat menerima perbedaan dan diadaptasikan dengan keputusan diri maka pemimpin dapat memiliki nilai pertimbangan yang bersifat individu dengan lebih baik.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Kerangka Pemikiran

Dasar daripada kerangka pemikiran adalah memadukan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian yang bertujuan untuk memfokuskan arah dalam melakukan penelitian, sehingga dapat menghindari penelitian yang tidak terarah dan terukur. Oleh karenanya kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan dalam data sebagai berikut;

Grafik 1.1 Operasionalisasi Konsep



1.7.2 Kerangka Konseptual

1. Seiring perkembangan zaman bahwa Kepemimpinan adalah salah satu faktor penting dalam pelaksanaan roda organisasi, terlebih roda organisasi pemerintahan. Keberhasilan daerah tak terlepas daripada pemimpin daerahnya membawa keberhasilan dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi masyarakatnya.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat mengadopsi nilai nilai demokrasi sebagai perwujudan dari tonggak penerus kepemimpinan bangsa, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin di negeri ini telah disepakati dengan dipilih melalui Pemilu, akan tetapi terdapat wilayah di negeri ini yang telah dipimpin oleh seorang pemimpin secara monarki jauh sebelum negeri ini merdeka dan berdiri. Sehingga konsensusnya daerah tersebut mendapat keistimewaan berupa mengelola pemimpin sesuai adat dan budaya yang telah terjadi, daerah tersebut dikenal sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X.
3. Konesus keistimewaan dilandasi dengan adanya Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga Bulan Agustus tahun 2020 Keistimewaan DIY telah diperingati selama sewindu (8 tahun).
4. Kepemimpinan Transformasional merupakan salah satu gaya atau model Kepemimpinan yang dikembangkan oleh James MacGregor Burns yang dimana seorang pemimpin berfokus pada pengayoman terhadap pengikutnya untuk menggerakkan roda dalam organisasi. Teori ini kemudian

dikembangkan oleh Benard M. Bass dan Ronald. E Riggio (2006), yang kemudian penjabaran dari kepemimpinan ini lah yang diadopsi oleh penulis untuk Menyusun proposal skripsi.

5. Lebih lanjutnya, penelitian dilaksanakan tahun 2021 setelah sewindu keistimewaan DIY. Kiprah Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur dalam refleksi Keistimewaan DIY diukur dengan faktor kepemimpinan Transformasional yang berupa; *Idealized Influence* (pengaruh ideal atau karisma diri), *Inspirational Motivation* (motivasi inspirasional atau inspirasi), *Intellectual Stimulation* (stimulasi intelektual), dan *Individualized Consideration* (pertimbangan yang bersifat individual) sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Bass dan Riggio (2006).

Tabel 1.1 Komponen Kerangka Konseptual Kepemimpinan Transformasional sebagai Indikator Keberhasilan Sri Sultan Hamengku Buwono X memimpin DIY dalam refleksi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Aspek	Penjelasan	Indikator
<i>Idealized Influence</i> (Karisma atau Pengaruh Ideal)	Pemimpin yang memiliki sesuatu kemampuan, ketekunan, dan tekad yang luar biasa yang dapat diidentifikasi oleh pengikut. Pemimpin juga memiliki sebuah komitmen rasa yang tinggi akan misi kolektif pengikutnya untuk mencapai sebuah gagasan serta tujuan (visi) yang besar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sebuah pengaruh yang luar biasa yang secara khusus/unik dimiliki oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam mewujudkan nilai – nilai keistimewaan DIY. 2. Terdapat kemampuan, ketekunan, dan tekad dari Sultan Hamengku Buwono X dalam menciptakan sebuah gagasan Visi pembangunan daerah sehingga dapat disepakati oleh pengikut.

		3. Terdapat sebuah komitmen besar yang diarahkan menuju gagasan Visi oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam momentum Sewindu Keistimewaan DIY.
<i>Inspirational Motivation</i> (Motivasi Inspirasional atau Inspirasi)	Pemimpin mampu memberikan sebuah makna atau tantangan terhadap pelaksanaan pekerjaan/gagasan pembangunan daerah. Sehingga pemimpin mampu menciptakan menumbuhkan antusias dan optimis dari pengikut. Lebih dalam lagi akan timbul hubungan antara pemimpin dan pengikut yang bersinergi dalam pelaksanaan program kerja yang telah direncanakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat sebuah direksi secara khusus yang diberikan oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur untuk menciptakan “kesejahteraan masyarakat” dalam refleksi Sewindu Kesitimewaan DIY. 2. Terdapat sebuah sinergi yang didorong oleh Sultan Hamengku Buwono X kepada pengikut dalam pelaksanaan terkait program kerja keistimewaan DIY yang dikorelasikan dengan visi pembangunan daerah. 3. Terdapat sikap optimis yang dikembangkan oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam tatanan nilai keistimewaan DIY, sehingga adanya sebuah sinergi dengan pengikut untuk mempertahankan Keistimewaan DIY.
<i>Intellectual Stimulation</i> (Stimulasi Intelektual)	Pemimpin mampu mengadaptasikan pemahaman ilmu pengetahuan atau pengalaman yang telah terjadi untuk menyelesaikan permasalahan di daerah. Sehingga pemimpin didorong menjadi manusia yang memiliki sebuah dorongan intelektual yang melahirkan ide dan gagasan yang inovatif dan kreatif bagi pengikut.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapatnya sebuah pemahaman rasional oleh seorang Gubernur DIY terhadap nilai nilai filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai (<i>Local Wisdom</i>) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, bersosial, berpemerintah, bahkan berbangsa dan bernegara. 2. Terdapat budaya dan iklim organisasi yang diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai pedoman OPD untuk menjalankan amanah dalam nilai keistimewaan

		<p>“menciptakan pemerintahan yang baik”.</p> <p>3. Terdapat inovasi dan kreatifitas yang didorong oleh Sultan Hamengku Buwono X kepada OPD untuk menyelesaikan permasalahan di DIY.</p>
<p><i>Individualized Consideration</i> (Pertimbangan yang bersifat Individual)</p>	<p>Seorang pemimpin mampu memahami pengikutnya, sehingga dapat memutuskan hal yang baik atau menerima perbedaan pendapat untuk menghasilkan suatu keputusan dan pertimbangan diri yang relevan bagi daerah terutama mampu menuntaskan sebagian atau seluruh permasalahan yang terjadi pada masyarakat.</p>	<p>1. Terdapat dorongan pribadi yang diciptakan oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai keputusan dalam mendukung nilai keistimewaan “mewujudkan pemerintahan yang demokratis” dalam refleksi sewindu Keistimewaan DIY.</p> <p>2. Terdapat jaminan yang diciptakan Sultan Hamengku Buwono X dalam menciptakan nilai iklim kehidupan masyarakat yang Ke-Bhineka-Tunggal-Ika-an dalam bingkai NKRI di tengah nilai nilai luhur kebudayaan masyarakat DIY.</p>

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjabarkan dan mengulas secara detail peran peran Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur yang diulas dengan teori kepemimpinan Transformasional. Penelitian kualitatif menjadi suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami (Creswell: 2016). Penelitian ini mewujudkan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus sesuai yang diambil secara ilmiah dengan tujuan menggambarkan dan menafsirkan suatu kejadian dan realita sosial yang terjadi pada masyarakat terlebih lagi penelitian yang terjadi pada bidang ilmu politik dan pemerintahan.

Pengambilan informan sebagai data dilakukan secara *purposive sampling*, dalam buku metode penelitian menurut Sugiyono (2010) *purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan dan penentuan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang memiliki tujuan agar data yang diperoleh nantinya dapat lebih representatif. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D 2010)

Terlebih lagi pengambilan penelitian menggunakan kualitatif agar penulis dapat memberikan informasi berupa gambaran kiprah seorang Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dengan refleksi sewindu Keistimewaan DIY secara rinci dan sistematis sesuai data dan fakta fakta yang diperoleh dilapangan.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta terutama pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Fokus utama dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap narasumber narasumber yang terkait dengan kiprah Kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X pada saat sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 hingga saat ini. Penelitian ini juga mengulas adanya fenomena fenomena yang terjadi pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pemimpin daerah pemerintahan.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek daripada penelitian ini adalah narasumber-narasumber yang berkaitan dengan kiprah Sultan Hamengku Buwono X dalam refleksi Keistimewaan DIY. Narasumber atau Informan adalah istilah sebutan dari subjek penelitian dalam

penelitian kualitatif. Informan dipilih dan dipertimbangkan melalui *purposive sampling*. Mengadopsi pemikiran Creswell (1994) bahwa konsep *purposive sampling* dilakukan dengan menyeleksi individu untuk diwawancarai atau diobservasi dengan tujuan didapatkannya informasi yang relevan dan memahami masalah apa yang sebenarnya terjadi.

Dengan demikian maka narasumber atau informan atau subjek dari penelitian yang berkaitan dengan kiprah Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY dalam refleksi keistimewaan DIY sebagai berikut;

1. Pejabat *Paniradya Kaistimewan* DIY,
 - a. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian,
 - b. Kepala Bidang Urusan Kebudayaan,
 - c. Plt. Kepala Bidang Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang,
2. Pejabat/ Anggota BAPPEDA DIY,
 - a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DIY
 - b. Bidang Pemerintahan

Setelah melaksanakan penelitian kepada subjek dalam penelitian dalam penelitian ini, peneliti melaporkan bahwa dalam pengajuan audiensi kepada narasumber tidak serta merta terdapat kemudahan yang begitu cepat. Beberapa kali peneliti mengalami kegagalan audiensi dalam pencarian data, yang diantaranya; Pertama, dengan subjek Sultan Hamengku Buwono X, peneliti telah beberapa kali menghubungi dan mengajukan audiensi bersama sebagai subjek utama, akan tetapi disposisi surat diturunkan kepada *Paniradya Kaistimewan* DIY dan BAPPEDA

DIY. Pada usaha selanjutnya penulis mencoba kembali mengajukan audiensi kembali kepada Sultan Hamengku Buwono X akan tetapi tidak direspon baik oleh sekretaris pribadi Sultan Hamengku Buwono X.

Kedua, dengan subjek salah satu narasumber dari Universitas Gadjah Mada yang dikenal sering mengamati Aristokrasi di Jawa dan di Indonesia, Bayu Dardias Kurniadi, Phd. Akan tetapi dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kepadatan jadwal Bayu Dardias, penulis tidak sempat melaksanakan audiensi dengan Bayu Dardias, tetapi Bayu Dardias memberikan sumber sekunder yang berasal dari Tesis Bayu Dardias (2019) dengan judul "*Defending the Sultan's Land: Yogyakarta, Control over Land and Aristocratic Power in Post-Autocratic Indonesia*" sebagai bahan bagi pembelajaran dan data bagi penelitian ini.

1.8.4 Data Penelitian

Data data yang diambil dapat dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan daripada sumber sumber terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa literasi yang didapatkan dari buku cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik dan tema ini, dan laman website.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dengan upaya pengambilan data di lapangan secara langsung. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D 2010) Sehingga berkaitan dengan data Primer ini maka data diperoleh dengan wawancara dan pengamatan atau observasi lapangan dengan sumber terkait. Data Primer diperoleh dilakukan dengan

wawancara mendalam terkait dengan informan informan atau narasumber yang telah menjadi subjek penelitian dalam kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X.

1.8.4.2 Data Sekunder

Berbeda dengan halnya data primer, data sekunder ini diperoleh oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Data sekunder diperoleh dari beberapa literasi yang didapatkan dari buku cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik dan tema, dan laman website. Seluruh literasi dan studi pustaka penelitian ini akan bersangkutan dengan topik dan tema kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

1.8.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber untuk mendapatkan jawaban sebagai data penelitian. Mengutip buah pikir Moleong (2018), memaparkan bahwa wawancara merupakan dialog dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Teknik wawancara dilakukan dengan tatap muka dengan informan atau narasumber yang berkaitan dengan kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X.

1.8.5.2 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data berupa pengamatan langsung dan mendalam terkait dengan subjek atau objek penelitian, kemudian peneliti mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan pengamatan mendalam tersebut. Menurut Burhan Bungin (2006) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit. (Moloeng 2018)

Teknik Observasi atau pengamatan langsung dan mendalam dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dalam peran sebagai individu mandiri yang mengikuti magang didalam *Paniradya Kaistimewaan DIY*.

1.8.5.3 Dokumentasi

Menurut Moloeng (2018) Dokumen merupakan suatu catatan atau karya yang sudah berlalu. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian, dalam situasi sosial yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Fokus Teknik Dokumentasi ini dilakukan dengan banyak mengambil publikasi publikasi dari wawancara dan teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X. Selain itu dokumentasi juga diambil dari situs literasi milik Sultan Hamengku Buwono X ketika menjadi seorang pemimpin baik sebelum ada atau sesudah adanya Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.8.5.4 Studi Pustaka

Studi Pustaka diperoleh dari beberapa literasi yang didapatkan dari buku cetak, jurnal, skripsi terdahulu yang membahas topik dan tema, dan laman website. Seluruh literasi dan studi pustaka penelitian ini akan bersangkutan dengan topik dan tema kiprah Kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X.

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Dalam Buku Sugiyono (2015) Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa kegiatan analisis data penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai data tersebut tuntas. Kegiatan analisis dan interpretasi data terbagi kedalam; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.8.6.1 Reduksi Data

Sugiyono (2015) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan pola sekaligus menyeleksi data data yang tidak penting. Mereduksi data adalah proses menyeleksi dan mengolah data agar lebih tajam dan akurat sehingga informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dapat tercakup, terukur, dan terfokus. Sehingga penting sekali adanya tahapan reduksi data untuk mencapai tahap penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1.8.6.2 Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dimana peneliti menjabarkan data data yang telah diperoleh dan direduksi. Peneliti akan mendeskripsikan penenlitiannya dalam bentuk uraian singkat atau panjang, gambar, tabel, atau sejenisnya untuk

menjelaskan penelitiannya. Dalam penyajian data, penulis juga menjelaskan korelasi permasalahan, topik, dan tema penelitian dengan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, hal ini menunjukkan adanya ketersinambungan dengan operasionalisasi konsep penelitian terhadap teori yang digunakan, sehingga penyajian data dapat menjadi terukur dan terarah.

1.8.6.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan oleh peneliti setelah melalui tahap penyajian data. Kesimpulan dan verifikasi merupakan prosesi kesinambungan dari permasalahan dan topik penelitian dengan bukti dan data-data yang ditemukan di lapangan. Biasanya penarikan kesimpulan dan verifikasi ini dapat menjawab rumusan masalah awal yang telah ditentukan. Dalam tahapan ini terdapat kesimpulan sementara dan kesimpulan akhir. Kesimpulan sementara dapat terjadi ketika dalam penelitian masih ditemukan data data pendukung yang relevan sehingga seorang peneliti diharuskan meverifikasi kembali data tersebut dengan permasalahan yang terjadi. Sedangkan kesimpulan akhir terjadi ketika tahapan kesimpulan sementara telah usai dan didukung data data valid yang relevan serta cukup untuk menjawab rumusan masalah.